

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

- Bakhtiar. *Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2015.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Raja Jakarta: Grafindo Persada. 2012.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: MKRI dan Pusat Studi HTN FHUI, 2004.
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- , *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000.

-----, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press, 2007.

Sri Soemantri. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1986.

Syukri Asy'ari, dkk. *Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tetang Mahkamah Konstitusi.

3. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014

4. Jurnal, Skripsi dan Internet

Amar F. *Analisis Yuridis Kewenangan MK dalam Membuat Putusan yang bersifat Mengatur (Positive Legislator)*.
<http://moslemjusticeleadership.blogspot.co.id/2014/05/analisis-yuridis-kewenangan-mk-dalam.html>.

Damang. *Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power)*.
<http://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasaan-separation-of-power.html>.

Damang. *Pemisahan Kekuasaan Vs Pembagian Kekuasaan*.
<http://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasaan-vs-pembagian-kekuasaan.html>.

Mahfud MD. *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: www.mahfudmd.com. 2009.

Ramses Purba. *Analisa Yuridis Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*.
https://ramsespurba.wordpress.com/2013/07/11/analisa-yuridis-putusan-ultra-petita-mahkamah-konstitusi-dalam/#_ftn7

Satya Sembiring. *Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat negative legislature menjadi positive legislature*. <http://satyasembiring.wordpress.com/2013/12/05>
<https://satyasembiring.wordpress.com/2013/12/05/putusan-mahkamah-konstitusi-bersifat-negatif-legislature-menjadi-positif-legislature/>.

Wardah Zikra Yuniarsyah. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2014.

Wirman Hadi, *Kedudukan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2013.